

**PERUMUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG
(STUDI KASUS PELANGGARAN HAM DI MYANMAR)**

***JAPANESE FOREIGN POLICY FORMULATION
(STUDY OF HUMAN VIOLATION CASE IN MYANMAR)***

Khairiyah, Roby Hidayat

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
khairiyah.umsb@gmail.com

ABSTRAK : Kasus pelanggaran HAM di Myanmar telah menjadi sorotan di dunia Internasional, banyak negara-negara di dunia yang menyatakan sikap penolakannya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga negaranya. Tulisan ini kemudian mencoba menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Jepang dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Sebagai mana kita ketahui Jepang adalah salah satu negara pendonor bantuan terbesar bagi Myanmar terutama dalam bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur melalui pencarian data dan informasi dari buku dan media online yang terkait dengan perumusan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Myanmar. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Jepang cenderung bersikap netral terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Myanmar dan tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan akan tetapi dibalik itu semua penulis melihat adanya kepentingan nasional Jepang terhadap Myanmar yang merupakan salah satu ladang investasi terbesar Jepang di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Jepang, Perumusan kebijakan, Pelanggaran HAM Myanmar

ABSTRACT : *Cases of human rights abuses in Myanmar have become a global phenomenon, with many countries in the world expressing their denial of human rights abuses committed by the Myanmar military junta against its citizens. This paper then attempts to analyze how Japan's foreign policy in responding to human rights violations in Myanmar. As we all know Japan is one of the largest donor countries for Myanmar especially in economic and humanitarian aid. The method used in this study is the study of literature through the search for data and information from books and online media related to the formulation of Japanese foreign policy towards Myanmar. The results of this study found that Japan tends to be neutral on human rights violations in Myanmar and still provide humanitarian assistance but behind it all authors see Japan's national interest in Myanmar which is one of Japan's largest investment farms in Southeast Asia.*

Keywords: *Japanese foreign policy, policy formulation, Myanmar human rights violations*

A. PENDAHULUAN

Jepang dan Myanmar memiliki hubungan yang erat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. “Persahabatan secara Historis” ini didasarkan pada sentimen dan pengalaman para pemimpin kedua negara. Para tentara Myanmar dilatih oleh perwira tentara Jepang yang melahirkan Tentara Kemerdekaan Myanmar. Hubungan bilateral kedua negara secara resmi dimulai pada tahun 1954 khususnya dibidang ekonomi, bantuan demi bantuan telah diberikan Jepang pada Myanmar sehubungan dengan telah ditandatanganinya perjanjian perdamaian dan reparasi perang (peace treaty and war reparations agreement). Bantuan pembangunan dalam skala besar yang diberikan oleh pemerintah Jepang dimaksud untuk memperkuat hubungan khusus kedua negara .

Setelah perubahan kebijakan pada awal 1970-an, hubungan Myanmar Jepang cukup aktif dengan seringnya terjadi pertukaran kunjungan oleh pejabat, pemimpin bisnis, dan pakar teknis tentang proyek-proyek pembangunan. Pada November 1973 Jenderal Ne Win melakukan kunjungan ketiganya ke Jepang. Dia meminta bantuan bilateral, serta dukungan Jepang dalam mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan internasional termasuk Bank Dunia, dan Bank

Pembangunan Asia (ADB). Pada tahun 1974 Myanmar bergabung dengan ADB, di mana Jepang adalah pemegang saham terbesar.

Namun kudeta militer (1988) membuat hubungan bilateral kedua negara memburuk dengan adanya protes pro-demokrasi yang berlangsung di Rangoon dan kota-kota lain. Peristiwa ini dikenal sebagai Pemberontakan 8-8-88, protes ini bertujuan untuk menggulingkan kediktatoran Jenderal Ne Win, pemberontakan ini mencapai klimaks pada 8 Agustus 1988. Pada 13 September 1988 Jepang secara resmi mengumumkan pembekuan ODA terhadap Myanmar karena ketidakstabilan politik di negara ini. (irrawaddy, 2018).

Kebijakan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Jepang yang muncul pada akhir Perang Dingin. Pada tahun 1992, pemerintah Jepang mengadopsi "Piagam Bantuan Pembangunan Resmi," yang mewajibkan Jepang menggunakan bantuan asingnya untuk mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan. Sejak awal 1990-an, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang membuat Jepang memberlakukan "persyaratan hak asasi manusia" dengan meningkatkan jumlah bantuan asing ke negara-negara penerima dengan catatan hak asasi manusia yang baik dan mengurangi bantuan ekonomi ke negara-negara dengan praktik HAM yang buruk. (Furuoka, 2005)

Bantuan kemanusiaan yang diberikan Jepang berdasarkan kasus per kasus, dengan memperhatikan demokratisasi dan hak asasi manusia, terutama untuk proyek-proyek yang sedang berlangsung dan usaha-usaha lain di bidang kebutuhan dasar manusia. Pihak berwenang Myanmar belum menunjukkan upayanya dalam mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan Myanmar terhadap hak asasi manusia dan Jepang juga belum memberikan tingkat bantuan yang signifikan. Namun, pada bulan Maret 1998, Jepang memutuskan untuk memberikan pinjaman 2,5 miliar yen dengan alasan kemanusiaan, terkait keselamatan sebagai bagian dari Proyek Perluasan Bandara Internasional Yangon, sebuah proyek yang sedang berjalan yang sebelumnya didanai dengan bantuan Jepang. Selain itu, Jepang memberikan bantuan hibah Myanmar untuk meningkatkan produksi pangan. Pada bulan Juli 1998 Jepang juga memberi bantuan untuk memerangi masalah narkoba. (Official Development Assistance (ODA), 1998)

Negara – negara besar barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, sangat mengecam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, lain halnya dengan Jepang tetap mempertahankan hubungan bilateral dengan Myanmar, karena Jepang menganggap bahwa jika dilakukan pendekatan keras justru dapat mendorong Myanmar lebih dekat ke negara tetangganya, yaitu China yang merupakan pendukung utama politik dan mitra niaga Myanmar. Jepang terus memberikan bantuan kemanusiaan dan darurat kepada Myanmar. (ANTARANEWS.com, 2011)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan luar negeri yang diberikan Jepang merupakan bagian dari kebijakan yang tidak luput dari dari kepentingan nasional. Bantuan luar negeri di jadikan Jepang sebagai cara alternatif untuk terlibat dalam isu-isu internasional. Hal ini juga di dimanfaatkan Jepang untuk membangun hubungan bilateral dengan negara penerima bantuan.

Pendekatan yang di gunakan oleh penulis untuk menganalisis perumusan kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Myanmar adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Edward S. Manson. Menurut Manson “bantuan luar negeri dilihat sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang biasanya secara tidak langsung merujuk pada program-program bantuan luar negeri yang dibentuk berdasarkan pada kepentingan negara pemberi bantuan”. (Manson, 1964) disamping itu pastinya negara penerima bantuan juga ikut mendapat keuntungan atas bantuan tersebut. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan Jepang kepada Myanmar dianggap sebagai kebijakan luar negeri yang diasumsikan sebagai wujud kepentingan Jepang sebagai negara pemberi bantuan dan juga ada keuntungan bagi Myanmar sebagai negara penerima. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perumusan kebijakan menurut Holsti (1992) adalah:

1. Faktor Eksternal seperti sistem internasional, tujuan dan kebijakan negara lain, masalah global dan regional, hukum internasional, serta opini dunia
2. Faktor domestik seperti kepentingan nasional, baik kepentingan sosial, ekonomi maupun keamanan

3. Faktor dari pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan (Kalvei, 1992)

Berdasarkan pada pemaparan yang dikemukakan oleh Holstie maka dapat kita simpulkan bahwa perumusan kebijakan Jepang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor Eksternal dan faktor Internal. Jika dilihat dari segi faktor Eksternal mengenai permasalahan global pelanggaran HAM di Myanmar merupakan permasalahan global yang menyita perhatian dunia, dengan adanya bantuan kemanusiaan yang diberikan Jepang maka opini dunia terhadap Jepang akan positif, sebagai negara yang peduli terhadap isu kemanusiaan, akan tetapi di lain sisi lain citra Jepang juga akan bisa menjadi negatif karena dianggap pro terhadap pelanggaran HAM di Myanmar karena tidak memutuskan hubungan bilateral dengan negara yang melakukan pelanggaran HAM.

Selain faktor Eksternal, faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor domestik yakni hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional suatu negara, dalam kasus ini penulis melihat kepentingan ekonomilah yang menjadi tujuan utama Jepang dalam menjalankan politiknya. Isu-isu kemanusiaan dapat menjadi ladang bagi negara-negara maju seperti Jepang untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia tenggara dengan adanya hutang budi negara penerima bantuan terhadap negara pemberi bantuan maka akan secara mudah suatu negara dapat menguasai negara tersebut.

Dalam bukunya Alan Rix (1993) memaparkan beberapa motif bantuan secara umum:

1. Untuk motif kemanusiaan, yaitu dimana suatu negara memberikan bantuan luar negerinya atas dasar kemanusiaan karena suatu negara terkena bencana atau perang.
2. Untuk citra atau harga diri, yaitu suatu negara menyalurkan bantuannya karena ingin membangun image positif
3. Untuk mengamankan kepentingan nasional, yaitu suatu negara menyalurkan bantuan luar negerinya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya baik kepentingan keamanan maupun kepentingan ekonomi.
4. Untuk memperoleh kembali keuntungan dalam hal investasi dan pembukaan pasar di negara berkembang. (Rix, 1993)

Berdasarkan pemaparan Alan dalam bukunya yang berjudul *"Japan's Foreign Challenge: Policy Reform and Aid Leadership"* maka dapat kita kaitkan dengan motif pemberian bantuan oleh Jepang kepada Myanmar dilatarbelakangi oleh pertama, memang untuk motif kemanusiaan akan tetapi disamping itu Jepang juga menyelipkan kepentingan ekonomi dibalik bantuan kemanusiaan tersebut, selain itu motif lain untuk memperoleh kembali keuntungan dalam hal investasi dan pembukaan pasar di negara berkembang juga merupakan motif sekaligus tujuan akhir dari bantuan kemanusiaan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui pencarian data dan informasi dari buku dan media online yang terkait dengan kebijakan luar negeri Jepang dalam studi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap warga negaranya. Melalui kajian literatur yang dilakukan, penulis mencoba untuk menganalisis secara mendalam sisi politis dibalik perumusan kebijakan luar negeri Jepang terhadap pelanggaran HAM di Myanmar baik dari segi cara perumusan kebijakan, pendekatan yang digunakan hingga sikap yang diperlihatkan Jepang di dunia internasional.

D. HASIL PENELITIAN

Semenjak berakhirnya masa feodal di Jepang, perubahan dan perkembangan dari karakter politik luar negeri Jepang mengalami beberapa perkembangan yang tujuannya tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai dari kelompok pemerintah Jepang pada khususnya dan untuk memperoleh kesejahteraan rakyat pada umumnya. sehingga dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya Jepang seringkali mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan dalam menentukan karakter diplomasinya agar sesuai dengan perkembangan zaman di lingkungan internasional. Secara umum arah kebijakan luar negeri yang berubah tersebut tentunya merupakan pengaruh dari sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan dalam negeri Jepang itu sendiri.

Jepang bersikap Netral terhadap pelanggaran HAM di Myanmar

Dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, Jepang yang berbeda pendapat dengan beberapa negara besar di dunia. Jepang bersikap netral dalam kebijakan luar negerinya terhadap kasus pelanggaran HAM di Myanmar, hal ini berbeda dengan sikap Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengancam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, dan menghentikan semua bentuk kerjasama dengan negara ini. Meskipun awalnya Jepang sempat menghentikan bantuan ekonomi pada tahun 1988, namun Jepang kembali melanjutkan pemberian bantuan atas dasar kemanusiaan pada tahun 1989-1993, diantaranya pembangunan bandara di Ragoon dan bantuan penasehat teknis ahli dan beasiswa untuk masyarakat Myanmar. Hal ini di sinyalir karena Jepang tidak menginginkan hubungannya dengan Myanmar menjadi rusak dan renggang, dan sisi lain Jepang takut Myanmar jatuh ke tangan China, yang memiliki hubungan ekonomi dan politik secara erat dengan rezim junta militer Myanmar. Selain itu Jepang juga memiliki kepentingan nasional terhadap Myanmar terutama kepentingan ekonomi, dimana Myanmar merupakan ladang investasi terbesarnya Jepang di kawasan Asia Tenggara.

Jepang tetap mempertahankan hubungan perdagangan dengan Myanmar karena Jepang menganggap bahwa, jika dilakukan pendekatan keras justru dapat mendorong Myanmar lebih dekat ke negara tetangganya, China yang merupakan pendukung utama politik dan mitra niaga Myanmar.

Analisis kebijakan luar negeri Jepang

Setelah pulih dari kehancuran dan kekalahan menyedihkan dari Perang Dunia II, Jepang telah menjadi salah satu negara industri terkemuka. Jepang kini telah memantapkan dirinya sebagai demokrasi yang stabil dengan ekonomi terbesar kedua di Dunia, yang menyumbang sekitar 10 persen dari produk nasional bruto Dunia. Sebagai negara industri yang sukses secara ekonomi Jepang melakukan kebijakan luar negeri yang positif dan responsif terhadap harapan masyarakat internasional.

(1) Kebijakan Luar Negeri sebagai Bangsa yang Bebas dan Demokratis

Jepang memilih untuk menjadi negara yang bebas dan demokratis setelah pengalaman tragisnya dalam Perang Dunia II. Demokrasi liberal sekarang berakar kuat di Jepang, dan rakyat Jepang menikmati kebebasan, kedamaian, dan kemakmuran. Jepang untuk memperkuat solidaritas politik dan ekonomi dan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai fundamental kebebasan dan demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Menyusul demonstrasi KTT *Williamsburg* tentang solidaritas di antara negara-negara ini, KTT London Juni 1984 mengadopsi Deklarasi tentang Nilai-Nilai Demokratis yang menegaskan kembali solidaritas. Atas dasar ini, Jepang telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri dalam kerangka pertahanan diri yang berdasarkan pada Konstitusi dan sesuai dengan kebijakan pertahanan serta tetap menegakkan tiga prinsip non-nuklir.

(2) Kebijakan Luar Negeri sebagai Bangsa Asia-Pasifik

Secara geografis terletak di wilayah Asia-Pasifik, Jepang berbagi warisan sejarah dan budaya dengan tetangganya dan menikmati hubungan politik dan ekonomi yang erat dengan mereka. Upaya diplomatik utama Jepang di kawasan Asia-Pasifik adalah dengan meredakan dan menyelesaikan berbagai ketegangan dan perselisihan regional. Pertama, Jepang harus berkontribusi sepadan dengan kekuatan nasionalnya terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Sangat penting bahwa Jepang harus bekerja sama dengan negara-negara tetangganya - termasuk Republik Korea, Cina, negara-negara ASEAN, dan negara-negara kepulauan Pasifik. Kedua, promosi pertukaran dan mengkonsolidasikan dukungan yang kuat untuk persahabatan Jepang dengan negara-negara lain di kawasan ini. melalui pertukaran budaya, pertukaran siswa, kerja sama teknis, dan cara lain.

Upaya Diplomatik Jepang untuk Perdamaian dan Kemakmuran

Dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia Jepang telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran dunia, yakni:

(1) Upaya untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata - Promosi Dialog

Langkah pertama bagi Jepang untuk melindungi keamanan dan kemakmurannya adalah melakukan segala upaya untuk menciptakan lingkungan internasional yang damai. Hal ini menuntut kebijakan

komprehensif, termasuk upaya politik untuk penyelesaian konflik dan relaksasi ketegangan, kerja sama dalam operasi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, promosi kontrol dan pelucutan senjata, dukungan untuk pemeliharaan dan penguatan sistem perdagangan bebas dan pertumbuhan non-inflasi yang berkelanjutan dari ekonomi dunia, bantuan untuk stabilitas dan pembangunan negara-negara berkembang, dan pembentukan sarana yang efektif untuk mengamankan sumber daya vital seperti energi dan makanan di masa damai dan dalam keadaan darurat.

(2) Kontribusi terhadap

Pembangunan Ekonomi Dunia yang Sedang dan Jangka Panjang

Pemulihan ekonomi berbeda dari satu negara ke negara lain, dan solusi dari masalah struktural seperti pengangguran tinggi, defisit anggaran struktural, dan penyesuaian lambat dari struktur industri adalah tugas jangka menengah dan jangka panjang yang dihadapi ekonomi maju. Dalam keadaan seperti ini, prioritas pertama dalam memastikan perkembangan ekonomi dunia yang sehat adalah untuk memelihara dan memperkuat sistem perdagangan bebas. Karena itu Jepang telah mengusulkan dimulainya Putaran Baru negosiasi perdagangan multilateral setelah Putaran Tokyo. Jepang tidak hanya mengikuti kebijakan manajemen ekonomi yang berpusat pada permintaan domestik tetapi juga telah memutuskan dan mengimplementasikan lima paket langkah-langkah pembukaan pasar sejak tahun 1981. Ini adalah bagian dari upaya Jepang untuk mempertahankan hubungan ekonomi eksternal yang harmonis dan untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi dunia, dan sangat penting bahwa Jepang terus menekankan pengelolaan kebijakan ekonomi yang seimbang.

(3) Kerjasama untuk Stabilisasi dan Pengembangan Negara Berkembang

Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sangat penting bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Mengingat kenyataan bahwa sebagian besar konflik yang sedang berlangsung di dunia saat ini adalah di daerah berkembang, Jepang adalah negara industri maju yang paling bergantung pada negara lain baik dalam perdagangan maupun dalam pengadaan sumber daya. Jepang harus bekerja sama dalam pengembangan negara-negara berkembang, tidak hanya untuk alasan kemanusiaan tetapi juga demi seluruh komunitas global. Kerja sama semacam ini juga demi kepentingan nasional Jepang sendiri dalam arti bahwa perdamaian dunia merupakan prasyarat bagi kemakmuran dan stabilitas Jepang.

Kerjasama Jepang dengan negara-negara berkembang harus diperluas melalui berbagai cara secara komprehensif. Salah satu caranya adalah penguatan dan perluasan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA). ODA Jepang pada tahun 1983 berjumlah \$ 3,76 miliar, yang secara kuantitatif merupakan jumlah yang cukup signifikan. (Mofa, 1983) Namun, Jepang masih tertinggal dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dalam hal persentase produk nasional bruto (GNP) yang dibelanjakan untuk ODA dan dalam bagian hibah untuk total ODA. Jepang harus melanjutkan upayanya untuk memperkuat ODA-nya dengan memenuhi target jangka menengahnya untuk menggandakan ODA dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas bantuan ini dan untuk memastikan penerapannya yang efektif dan efisien.

Tidak hanya ODA tetapi bantuan lain juga harus diperluas ke upaya swadaya negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor mereka ke Jepang. Karenanya penting bagi Jepang untuk melanjutkan upayanya terkait dengan langkah-langkah pembukaan pasar untuk produk-produk dari negara-negara berkembang. Investasi langsung swasta, yang tidak menyiratkan beban utang tambahan, juga memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan kemampuan ekspor negara-negara berkembang. Dalam hubungan ini, diharapkan negara-negara berkembang akan lebih meningkatkan lingkungan untuk menerima investasi. Jepang telah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi yang mencari solusi untuk masalah seperti stabilitas harga komoditas, perdagangan, penyesuaian struktural, akumulasi hutang, dan mata uang dan keuangan.

Penghargaan terhadap kemanusiaan adalah elemen penting lainnya dalam semua upaya diplomatik Jepang, pemerintah Jepang telah berupaya aktif untuk mengatasi masalah-masalah ini

dengan mendukung proposal yang diajukan oleh PBB untuk langkah-langkah komprehensif mengenai krisis pangan Afrika dan dengan memperluas bantuan pangan dan bantuan teknis.

Perumusan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Myanmar

Dalam pembuatan kebijakan luar negerinya Jepang menggunakan pendekatan *Wholistic*, Jepang menggunakan pendekatan ini dalam Pengambilan keputusannya, karena hanya melibatkan sekelompok orang saja dalam perumusan kebijakan luar negerinya yaitu hanya kaum elite negara saja, akan tetapi kebijakan yang diambil untuk jangka panjang, untuk keberlangsungan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. Perumusan kebijakan luar negeri yang diambil Jepang dengan cara *Wholistic* terlihat dari kepentingan ekonomi Jepang terhadap Myanmar yang merupakan investasi terbesarnya di kawasan Asia tenggara. Keputusan ini diambil oleh hanya sebagian kaum elit politik seperti perdana menteri Jepang, wakil perdana menteri dan sekelompok elit politik lainnya, yang tujuannya jangka panjang untuk memperkuat pengaruh Jepang di Myanmar dan menjauhkan Myanmar dari pengaruh China.

E. PENUTUP

Secara keseluruhan dari pemaparan studi kasus diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, sikap netral yang di tunjukkan oleh Jepang dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Myanmar tidak terlepas dari sisi politis dan kepentingan nasional Jepang itu sendiri, ketakutan Jepang akan kedekatan Myanmar dengan China menjadi salah satu alasan harmonisnya hubungan kedua negara ini. Jepang tidak ingin kehilangan Myanmar sebagai ladang investasi terbesarnya di Asia Tenggara, dan tetap ingin menjalin hubungan baik dengan Myanmar meskipun banyak negara di dunia yang mengecam negara ini karena kasus pelanggaran HAM. Kedua, Diplomasi ekonomi yang di jalankan Jepang melalui pemberian bantuan untuk program pengembangan di Myanmar bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya di Kawasan Asia Tenggara.

F. DAFTAR PUSTAKA

- irrawaddy, T. (2018, October 5). Eight Decades of Myanmar-Japan Relations at a Glance. <https://www.irrawaddy.com/specials/timeline-eight-decades-myanmar-japan-relations-glance.html>.
- Furuoka, F. (2005). Human Rights Conditionality and Aid Allocation: Case Study of Japanese Foreign Aid Policy. *BRILL*, https://brill.com/abstract/journals/pgdt/4/2/article-p125_1.xml.
- Official Development Assistance (ODA)*. (1998, 12). Dipetik January 23, 2019, dari Ministry of Foreign Affairs of Japan : <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1998/12.html>
- ANTARANEWS.com. (2011, December 26). Jepang dorong Myanmar teruskan perubahan. hal. <https://www.antaraneews.com/berita/290350/jepang-dorong-myanmar-teruskan-perubahan>.
- Manson, E. S. (1964). *Foreign Aid and Foreign Policy*. New York: Council on Foreign Policy.
- Kalvei, H. J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis 6 th ed*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Rix, A. (1993). *Japan's Foreign Challenge: Policy Reform and Aid Leadership*. London : Routledge.
- Mofa. (1983). *BASIC TASKS OF JAPAN'S FOREIGN POLICY*. Dipetik January 23, 2019, dari www.mofa.go.jp: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1983/1983-1.htm